



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022
KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
18-22 APRIL 2022**

*

**

**

*

JAKARTA 2022



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022
KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
18-22 APRIL 2022

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Reses ke Provinsi Sulawesi Tenggara ini dalam rangka meninjau dan menghimpun informasi terkait dengan permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Pertanian, serta Bidang Kelautan dan Perikanan. Adapun dasar hukum dari Kunjungan ini mengacu pada:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI April 2022.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 16 Maret 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Tenggara adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pertanian, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Tenggara; serta
3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

C. RUANG LINGKUP

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IV, yaitu Bidang Pertanian, Pangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan.

D. SUSUNAN TIM

Susunan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI) serta para Anggota Komisi IV DPR RI.

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada tanggal 18-22 April 2022 dan bertempat di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Utara.

F. LOKASI KUNJUNGAN KERJA

1. Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Jl. H. Abdul Silondae No.1, Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93111
2. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari. Jalan Pelabuhan Samudra, Komplek PPS, Punday, Kec. Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93231
3. WIUP PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara Blok Mandiodo, Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. GAMBARAN UMUM

A. Profil Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dari 6 (enam) provinsi di wilayah regional Sulawesi, memiliki total luas wilayah 148.067,7 km², meliputi luas daratan 38.067,7 km² dan luas laut 110.000 km². Panjang garis pantai 1.740 km, jumlah pulau 651 buah, 361 pulau diantaranya telah memiliki nama, 290 pulau belum memiliki nama dan hanya 86 pulau yang berpenghuni. Penduduk yang bermukim di wilayah kepulauan sebanyak 39 persen.

Batas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi :

- Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Barat : Teluk Bone (Provinsi Sulawesi Selatan)
- Sebelah Selatan: Laut Flores (Provinsi NTT)
- Sebelah Timur : Laut Banda (Provinsi Maluku)

Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara



Secara administratif Provinsi Sulawesi Tenggara terbagi menjadi 15 kabupaten, 2 kota, 222 kecamatan, 2.318 kelurahan dan desa. Berdasarkan hasil proyeksi BPS tahun 2020 penduduk Sulawesi Tenggara tercatat sebanyak 2.704.737 jiwa.

Tabel. 1.1 Pembagian Wilayah Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
Kab. Kolaka	Kolaka	12	135
Kab. Konawe	Unaaha	29	374
Kab. Muna	Raha	22	151
Kab. Buton	Pasarwajo	7	95
Kab. Konawe Selatan	Andoloo	25	351
Kab. Bombana	Kasipute	22	145
Kab. Wakatobi	Wanci	8	100
Kab. Kolaka Utara	Lasusua	15	133
Kab. Konawe Utara	Asera	13	173
Kab. Buton Utara	Buranga	6	91
Kab. Kolaka Timur	Tirawuta	12	133
Kab. Konawe Kepulauan	Wawonii	7	96
Kab. Muna Barat	Sawerigadi	11	86
Kab. Buton Tengah	Lakudo	7	77
Kab. Buton Selatan	Batauga	7	70
Kota Kendari	Mandongga	10	65
Kota Bau bau	Bau bau	8	43

Sektor Pertanian

Hasil pertanian khususnya tanaman pangan yang ada di Sulawesi Tenggara didominasi oleh tiga jenis tanaman utama yaitu padi, jagung, dan kedelai. Dari tiga jenis tanaman pangan tersebut, padi mendominasi produksi tanaman pangan di Sulawesi Tenggara. Sentra produksi padi berada di Kabupaten Konawe, dengan total produksi mencapai 198 279,88 ton di tahun 2021 atau 37,21 persen dari total produksi Sulawesi Tenggara. Sedangkan produk tanaman hortikultura di Sulawesi Tenggara cukup bervariasi. Untuk tanaman sayuran, terdapat bawang daun, bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, kubis, petsai/sawi, terung, tomat, dan lainnya. Cabai rawit, bayam, tomat, kacang panjang, dan kangkung menghasilkan produksi yang dominan untuk tanaman sayuran di Sulawesi Tenggara. Untuk tanaman buah-buahan, pisang, jeruk siam, dan durian menjadi tanaman yang banyak dihasilkan di Sulawesi Tenggara, selain tanaman buah-buahan lainnya. Produksi ketiga tanaman buah-buahan tersebut masing-masing 416.101 kuintal, 222.196 kuintal, dan 128.855 kuintal. Untuk tanaman biofarmaka, jahe, laos/lengkuas, dan kunyit menghasilkan produksi yang dominan untuk tanaman biofarmaka di Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk tanaman hias, adenium, anggrek, anthurium daun, dan palem menjadi tanaman hias yang banyak dihasilkan di Sulawesi Tenggara.

Sektor Peternakan

Produksi daging dari hewan ternak di Sulawesi Tenggara tahun 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Kenaikan produksi daging tersebut, termasuk produksi kenaikan untuk daging sapi perah, yaitu dari 3.720.990 kg menjadi 3.787.504 kg.

Sektor Perkebunan dan Kehutanan

Kakao menjadi komoditi perkebunan yang dominan dihasilkan di Sulawesi Tenggara. Tahun 2021 produksi kakao sebesar 110.770 ton,

dari luas tanam 238.592 hektar. Selain kakao, terdapat tanaman kelapa dan jambu mete yang produksinya juga tergolong besar, masing - masing sebesar 43.795 ton dan 46.508 ton pada tahun 2021.

Luas kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Tenggara tahun 2021 sebesar 3.742.909 hektar. Dari kawasan hutan tersebut, tercatat produksi kayu bulat sebanyak 47.662,04 m³.

Sektor Perikanan

Produksi perikanan budidaya di Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 didominasi oleh budidaya rumput laut, dengan produksi sebesar 272.325 ton dan nilai sebesar 1.024.684.109 (000 rupiah). Produksi tersebut paling banyak di *supply* oleh Kabupaten Muna sebanyak 89.589 ton dengan nilai 485.573.294 (000 rupiah).

B. Profil Kabupaten Konawe Utara

Kabupaten Konawe Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibu kotanya adalah Wanggudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007 dan Pejabat Sementara dilantik pada tanggal 2 Juli 2007. Secara geografis Kabupaten Konawe Utara terletak di bagian selatan khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 02°97' dan 03°86' LS, membujur dari Barat ke Timur antara 121°49' dan 122°49' BT. Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 5.003,39 Km² atau sekitar 13,38 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan laut (termasuk perairan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan) ±11.960Km² atau 10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara. Secara administrasi Kabupaten Konawe Utara berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Rوتا (Kabupaten Konawe).

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Laut Banda.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bondoala, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Anggaberri, Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Abuki (Kabupaten Konawe).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Utara.

Secara administratif Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 13 kecamatan, yang terbagi atas 159 desa dan 11 kelurahan. Penduduk Kabupaten Konawe Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 jumlahnya sebanyak 67.871 jiwa yang terdiri dari 35.112 jiwa laki-laki dan 32.759 jiwa perempuan, dengan angka sex ratio jenis kelamin sebesar 107,18. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun di Kabupaten Konawe Utara sebesar 2,7 persen. Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan peningkatan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya;
2. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan transportasi, energi listrik, telekomunikasi, dan sumber daya air, pelayanan sarana dan prasarana air minum, persampahan, air limbah, dan drainase untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah;
3. Pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan dalam rangka memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah;
4. Pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;

5. Pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang; dan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan penelaahan RTRW dan deskripsi wilayah di Kabupaten Konawe Utara, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan industri pertambangan di Kecamatan Motui dan Langgikima;
2. Pengembangan kawasan agropolitan secara terpadu di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Lasolo;
3. Pengembangan kawasan perikanan yang terintegrasi di Kecamatan Molawe, Kecamatan Lasolo dan Kecamatan Lembo;
4. Pengembangan kegiatan unggulan sub sektor perikanan tambak di Kecamatan Motui dan Sawa;
5. Pengembangan kawasan wisata Pantai Taipa di Kecamatan Lembo, pengembangan kawasan wisata bahari Pulau Labengki di Kecamatan Lasolo Kepulauan, pengembangan kawasan wisata Air Panas Wawolesea di Kecamatan Wawolesea, pengembangan kawasan wisata alam dan sejarah di Kecamatan Oheo dan Kecamatan Asera, dan pengembangan kawasan wisata alam minat khusus di Kecamatan Wiwirano;
6. Pengembangan kegiatan sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan dan hortikultura, sub sektor peternakan, sub sektor perikanan air tawar di Kecamatan Andowia, Asera, dan Oheo; dan
7. Pengembangan kegiatan perkebunan kelapa sawit serta industri pengolahannya di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima.

III. HASIL KUNJUNGAN

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari.

Kunjungan pertama Tim Komisi IV DPR RI mengunjungi Perusahaan pengolahan rajungan (*crab*) yaitu PT Jala Crabindo International (CJI) yang berada di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Tim Komisi IV DPR mendapatkan penjelasan mengenai profil perusahaan, manajemen, serta proses produksi. PT CJI telah menerima bahan baku (*raw material*) rajungan dari tahun 2021-2022 sebanyak 93.127,72Kg dan telah melakukan ekspor sebanyak 5 kali dengan jumlah produk sebanyak 180.000 kaleng. Target ekspor PT CJI per bulan adalah sebanyak 2-3 kali. Sedang target volume per ekspor sebanyak 36.000 kaleng. CJI telah mempekerjakan karyawan sebanyak 180 orang yang terdiri dari 150 orang bagian produksi dan 30 orang sebagai staf.

Aspirasi:

Kendala PT CJI adalah belum adanya depo kontainer untuk ekspor langsung ke negara tujuan Amerika Serikat sehingga PT CJI harus mengirim kontainer ke pelabuhan yang ada di Jawa seperti di Surabaya, Semarang, dan Jakarta yang berdampak kepada penurunan mutu produk serta adanya tambahan biaya dan waktu. Oleh sebab itu, PT CJI meminta kepada Tim Komisi IV DPR RI agar difasilitasi untuk tersedianya kontainer ekspor dari Kendari menuju negara tujuan ekspor.

Setelah berdialog dengan perusahaan pengolahan rajungan, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PPS Kendari yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan dialog bersama nelayan, dinas kelautan dan perikanan kota kendari, serta pengusaha perikanan kendari. Pada saat sesi dialog dengan masyarakat dan pengusaha perikanan, Tim Komisi IV DPR RI mendapatkan beberapa aspirasi diantaranya:

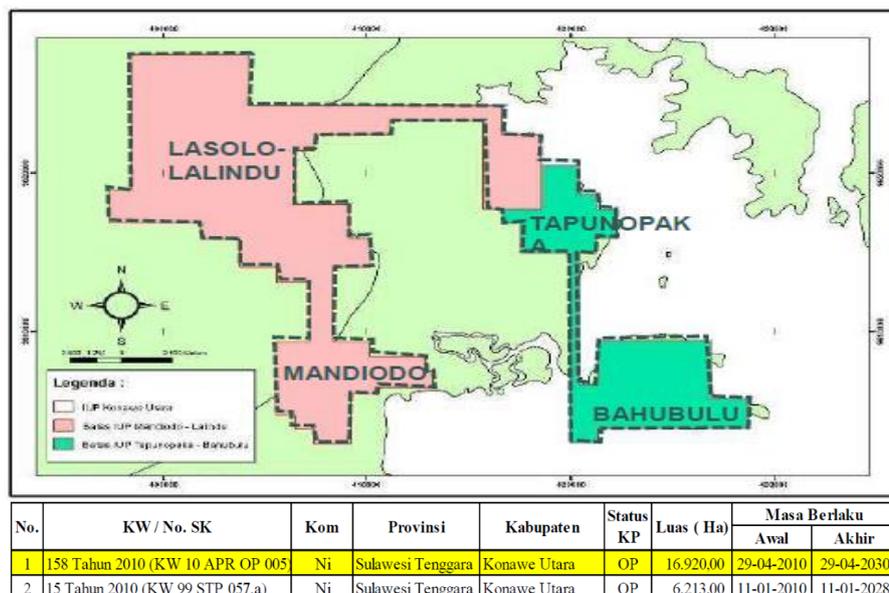
1. Meminta Pemerintah Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tidak menutup Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia 714. Karena wilayah tersebut merupakan daerah penangkapan nelayan lokal khususnya nelayan yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Selain itu, WPP 714 luas perairannya cukup sempit, di sebelah utara sudah berbatasan dengan perairan Sulawesi Utara sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan perairan Maluku. Apabila ditutup maka nelayan dari Sulawesi Tenggara akan mencari ikan dimana?
2. Meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk masalah pengurusan sertifikat kelaikan kapal (dokumen untuk melaut) yang sudah berpindah dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar pegawai PPS Kendari segera dilatih sehingga dapat segera melayani dan menerbitkan dokumen tersebut kepada nelayan. Karena sudah banyak nelayan Kendari yang tidak bisa melaut akibat belum terbitnya dokumen tersebut untuk pergi melaut.
3. Meminta agar adanya revisi terkait aturan retribusi atau penguatan kepada nelayan dari pemerintah Kota Kendari, yang mana nelayan merasa tidak adanya sebuah timbal balik kepada nelayan seperti adanya pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh nelayan dari pemerintah kota.
4. Meminta revisi terkait adanya PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena nelayan merasa sangat berat dengan adanya PP tersebut.
5. Meminta adanya tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk nelayan, karena kuota yang ada saat ini masih belum mencukupi kebutuhan nelayan Kota Kendari yang kira-kira kekurangannya sebanyak 10%.

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

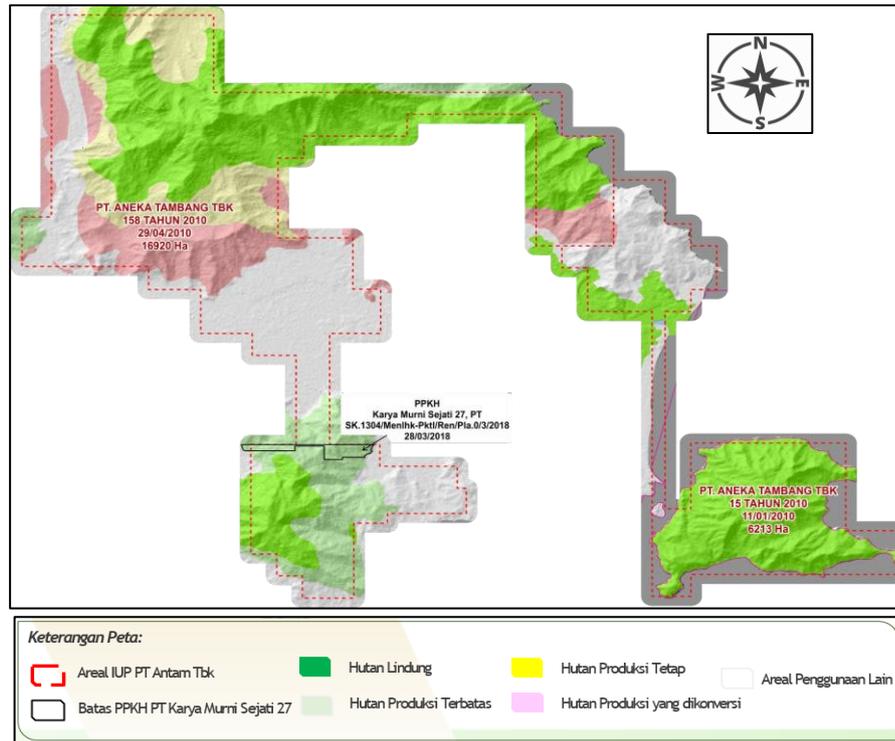
PT Aneka Tambang, Tbk. (PT Antam Tbk.) Blok Mandiodo, Kab. Konawe Utara

PT. Aneka Tambang, Tbk. (disebut PT. Antam Tbk.) Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara adalah badan usaha milik negara pada sektor penambangan bijih nikel, secara administratif termasuk dalam 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Asera, Molawe dan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis terletak antara 3°27'45.6" - 3°27'45.6" LS dan 122°17'2.995" BT.

Wilayah operasi penambangan bijih nikel Konawe Utara mendapat persetujuan Bupati Konawe Utara untuk KW 10 APR OP 005 ijin No. 158 Tahun 2010 seluas 16.920 Ha, sedangkan KW 99 STP 057.A/Sultra Ijin No. 15 Tahun 2010 seluas 6.213 Ha. Luas wilayah operasi produksi di dalam hutan lindung seluas 9.403 Ha, hutan produksi terbatas seluas 1.796 Ha dan di luar kawasan hutan seluas 11.934 Ha, sehingga luas keseluruhan wilayah penambangan PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara adalah seluas 23.133 Ha. Total luas kawasan hutan di Blok Mandiodo 11.695 Ha atau 69% dari luas IUP, sedangkan Blok Tapunopaka 3.424 Ha atau 55% dari luas IUP.



Gambar Peta dan Tabel Wilayah Operasi Penambangan PT. Antam Tbk.
Sumber : PT. Antam Tbk.



Gambar Peta Penutupan Lahan IUPPT. Antam Tbk.
 Sumber : Penutupan Lahan Tahun 2021, KLHK

Penambangan bijih nikel yang diterapkan oleh PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara adalah tambang terbuka dengan sistem berjenjang (*bench*). Jenjang yang dibuat pada setiap lokasi penambangan memiliki teras yang disesuaikan untuk ruang gerak alat berat dan transportasi bijih nikel. Dimensi jenjang untuk operasional yaitu lebar 20 m, tinggi jenjang maksimum 5 m dan kemiringan 45°- 60°. Adapun langkah-langkah kegiatan penambangan yang dilakukan yaitu : pembersihan lahan dan pengupasan tanah pucuk, pengupasan lapisan penutup, dan penggalian bijih nikel, serta pengangkutan bijih nikel. Kegiatan penambangan terdiri dari kegiatan pengupasan batuan penutup tahun 2021 sebesar 5.653.642 wmt dengan realisasi (proyeksi s.d. Desember 2027) sebesar 2.012.147 wmt (36%). Rencana kegiatan produksi LGO tahun 2021 sebesar 1.561.188 wmt, dengan realisasi (proyeksi s.d. Desember 2021) sebesar 1.707.208 wmt (77%). Kegiatan pengapalan hasil dari penambangan bijih nikel (ore) kemudian dikirim untuk memenuhi kebutuhan pabrik di dalam negeri.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penambangan, PT Antam Tbk., melakukan proses pengadaan kegiatan penambangan dengan metode Penunjukan Langsung kepada Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra, dimana bersama-sama dengan KSO Sultra Mining, PT. Lawu Industri Perkasa, dan PT Prima Utama Sultra membentuk konsorsium KSO Mandiodo Tapungaya Tapuemea (KSO MTT) berdasarkan kontrak nomor 9846/9231/DAT/2021, untuk melaksanakan pekerjaan jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu. Dalam proses pengadaan, PT Antam Tbk. didampingi FTTM ITB sebagai konsultan pendamping pengadaan kontraktor tambang IUP Mandiodo-Lasolo-Lalindu.

PT. Antam Tbk., UBPN Konawe Utara dalam hal pelaksanaan kegiatan penambangannya dilengkapi dokumen addendum amdal yang disetujui oleh Bupati Konawe dengan Surat Keputusan Bupati Konawe No. 426 Tahun 2006 tentang Persetujuan Kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel dan Pembangunan Pelabuhan tanggal 12 Juli 2006. Spesifik untuk IUP Mandiodo - Lasolo Lalindu karena sebagian besar berada di dalam kawasan hutan, maka pada tahun 2021 PT. Antam Tbk., UBPN Konawe Utara mengajukan revisi dan penyesuaian Dokumen *Feasibility Study* (FS) studi kelayakan, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk RKAB 2022 serta pengajuan perizinan berkegiatan di dalam kawasan hutan (IPPKH).

Tim Komisi IV DPR RI didampingi pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan kunjungan lapangan di WIUP PT Antam Tbk., UBPN Konawe Utara yang juga merupakan bekas area IPPKH PT KMS 27 dimana IUP nya telah dicabut serta berdiskusi dengan humas dan direktur PT KMS 27 yang juga sebagai warga lokal setempat serta perwakilan PT Antam Tbk., UBPN Konawe Utara. Adapun temuan lapangan dan hasil diskusi diantaranya :

1. Tim Komisi IV menemukan penambangan di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), KSO MTT di dalam IUP PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara Blok Mandiodo, tanpa

- dilengkapi kelengkapan dokumen lingkungan dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
2. Tim Komisi IV menemukan penambangan yang tidak berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), KSO MTT di dalam IUP PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara Blok Mandiodo, sehingga menyebabkan kerusakan dan pencemaran di sekitar tambang, dampaknya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar tambang, lebih jauh lagi telah menyebabkan kerusakan pesisir dan laut;
 3. Tim Komisi IV menemukan PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara tidak memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), di saat yang sama PT Antam Tbk. memiliki luas kawasan hutan di Blok Mandiodo 11.695 Ha atau 69% dari luas IUP, sedangkan Blok Tapunopaka 3.424 Ha atau 55% dari luas IUP serta IUP telah diperoleh sejak 2010 atau 11 sebelas tahun kepemilikan IUP;
 4. Tim Komisi IV menemukan 11 IUP dari 11 Badan Uasah Milik Swasta (BUMS) yang telah dicabut IUP nya di dalam area IUP Konsesi PT Antam Tbk. tidak melaksanakan pemulihan lingkungan seperti pengelolaan lingkungan pasca tambang, reklamasi dan rehabilitasi lahan.
 5. PT Antam Tbk. UBPN Konawe dalam hal pelaksanaan kegiatan penambangannya dilengkapi dokumen addendum AMDAL yang disetujui oleh Bupati Konawe dengan Surat Keputusan Bupati Konawe No. 426 Tahun 2006, dokumen addendum AMDAL No. 426 Tahun 2006 tersebut perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi keadaan lingkungan di area IUP konsesi PT Antam Tbk saat ini.



Foto bekas lahan tambang BUMS yang telah dicabut UIP nya namun belum melakukan kewajiban pemulihan lingkungan, reklamasi dan rehabilitasi lahan
Sumber : GAKKUM KLHK

BIDANG PERTANIAN

Hasil kunjungan kerja dan diskusi di Kantor Perum Bulog Kanwil Sulawesi Tenggara yang dihimpun antara lain:

- Pengadaan beras di Bulog dilakukan guna menjaga stok CBP sebesar 1 s.d. 1,5 juta ton dimana pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penjualan sehingga stok terjaga pada rentang yang diamanatkan Pemerintah sehingga realisasi pengadaan tergantung pada kebutuhan penjualan.

- Kendala pengadaan di Bulog yang timbul, antara lain:
 1. Permintaan beras yang meningkat sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga pasokan beras di produsen terbatas.
 2. Periode panen yang mundur dan tidak seragam antar daerah sehingga harga terjaga pada tingkat yang tinggi, beras dengan harga HPP menjadi sulit didapat.
- Upaya solusi dan strategi pengadaan Bulog, antara lain:
 1. Megoptimalkan pengadaan melalui kerjasama jangka panjang bertarget kepada mitra kerja pengadaan.
 2. Penambahan parameter kualitas guna mendapatkan gabah/beras dengan kualitas yang sesuai dengan amanat Pemerintah.
 3. Meningkatkan peran *Market Intelligence* guna memonitor perkembangan harga gabah/beras ditingkat produsen dan konsumen.
- Realisasi pengadaan beras dalam negeri kantor wilayah seluruh Indonesia tahun 2021 dan tahun 2022

REALISASI PENGADAAN DALAM NEGERI KANTOR WILAYAH SELURUH INDONESIA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022									
No	Kanwil	Target 2021 (Str Beras)				Target 2022 (Str Beras)			
		Total realisasi		%	Total realisasi *		%		
		Jan-Des	str gabah str beras		Jan-Des	str beras			
1	DKI JAKARTA & BANTEN	53.000	49.821	31.636	59,69%	53.200	848	1,59%	
2	JABAR	270.000	184.360	117.069	43,36%	233.300	9.856	4,22%	
3	JATENG	204.000	216.070	137.204	67,26%	203.700	15.029	7,38%	
4	D.I. YOGYA	74.000	87.478	55.548	75,07%	61.000	2.152	3,53%	
5	JATIM	331.000	239.366	151.997	45,92%	303.000	18.694	6,17%	
6	ACEH	12.600	19.039	12.090	95,95%	12.000	669	5,58%	
7	SUMUT	27.500	35.557	22.579	82,11%	23.000	1.028	4,47%	
8	RIAU & KEPRI	14.500	13.748	8.730	60,21%	12.700	1.534	12,08%	
9	SUMBAR	11.000	4.647	2.951	26,82%	8.400	273	3,25%	
10	JAMBI	8.000	22.615	14.360	179,51%	12.500	1.990	15,92%	
11	SUMSEL & BABEL	109.000	105.857	67.219	61,67%	94.000	5.237	5,57%	
12	BENGKULU	6.500	9.925	6.302	96,96%	8.200	358	4,37%	
13	LAMPUNG	108.000	73.569	46.716	43,26%	94.500	3.806	4,03%	
14	KALBAR	8.500	7.526	4.779	56,22%	7.400	627	8,48%	
15	KALTIM & KALTARA	8.000	5.090	3.232	40,40%	8.700	892	10,25%	
16	KALSEL	18.500	17.289	10.978	59,34%	16.500	249	1,51%	
17	KALTENG	7.500	7.704	4.892	65,22%	8.700	639	7,34%	
18	SULUT & GORONTALO	6.000	3.361	2.134	35,57%	8.400	370	4,40%	
19	SULTENG	31.300	24.662	15.660	50,03%	29.000	1.440	4,97%	
20	SULTRA	45.700	32.855	20.863	45,65%	36.000	1.604	4,46%	
21	SULSELBAR	303.000	539.045	342.294	112,97%	264.300	59.440	22,49%	
22	BALI	7.100	10.372	6.586	92,76%	5.400	2.432	45,04%	
23	N.T.B	127.000	160.642	102.008	80,32%	112.600	18.090	16,07%	
24	N.T.T	10.500	11.591	7.360	70,10%	9.000	1.083	12,04%	
25	MALUKU & MALUT	6.200	696	442	7,13%	4.000	310	7,75%	
26	PAPUA & PABAR	41.600	32.566	20.680	49,71%	32.000	1.495	4,67%	
JUMLAH		1.850.000	1.915.450	1.216.311	65,75%	1.661.500	150.146	9,04%	

*) Update Data Per 14 April 2022

• Pengadaan dilakukan guna meniaga stok CBP sebesar 1 sd 1,5 juta ton.

• Pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penialan sehingga stok terjaga pada rentang yang diamankan Pemerintah. Sehingga realisasi pengadaan tergantung pada kebutuhan penialan

• Kendala pengadaan:

1. Permintaan beras yang meningkat sebagai dampak pandemic Covid-19 sehingga pasokan beras di produsen terbatas.
2. Perkembangan harga cenderung diatas harga yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu mengacu pada Permendag no. 24 tahun 2020.



Solusi dan Strategi pengadaan:

1. Megoptimalkan Pengadaan melalui kerjasama jangka panjang bertarget kepada Mitra Kerja Pengadaan.
2. Penambahan parameter kualitas guna mendapatkan gabah/beras dengan kualitas yang sesuai dengan amanat Pemerintah.
3. Meningkatkan peran Market Intelligence guna memonitor perkembangan harga gabah/beras ditingkat produsen dan konsumen.

- Ketersediaan dan sebaran stok beras di seluruh Indonesia



- Realisasi penggunaan CBP kantor wilayah Sulawesi Tenggara



- Ketersediaan Stok Pangan



KETERSEDIAAN STOK PANGAN

Per 14 April 2022



www.bulog.co.id | Perum Bulog | @PerumBulog | @perum.bulog | Perum Bulog

6

- Realisasi Impor Daging Kerbau



REALISASI IMPOR DAGING KERBAU

PERKEMBANGAN IMPORTASI DAGING KERBAU TAHUN 2022

NO	RENCANA / REALISASI	TAHAP	PROGRES	Februari	Maret	April	Mei	JUMLAH (TON)
1	RENCANA (SESUAI KONTRAK)	TAHAP XXIV		10.976	-	-	-	10.976
		TAHAP XXV		-	9.016	-	-	9.016
		TAHAP XXVI		-	420	14.504	13.832	28.756
		SUB TOTAL		10.976	9.436	14.504	13.832	48.748
2	REALISASI	TAHAP XXIV	MASUK GUDANG	5.880	5.096	-	-	10.976
			SPPB	-	-	-	-	-
		TAHAP XXV	CLEARANCE	-	-	-	-	-
			MASUK GUDANG	-	8.316	504	-	8.820
		TAHAP XXVI	SPPB	-	-	140	-	140
			CLEARANCE	-	-	-	-	-
		TAHAP XXVI	MASUK GUDANG	-	-	-	-	-
			SPPB	-	-	252	-	252
		SUB TOTAL	CLEARANCE	-	-	-	-	-
			MASUK GUDANG	5.880	13.412	504	-	19.796
SPPB	-		-	392	-	392		
TOTAL YANG SUDAH TIBA			5.880	13.412	896	-	20.188	
3	SISA KUANTUM YANG BELUM TIBA	TAHAP XXIV		-	-	-	-	-
		TAHAP XXV		-	-	56	-	56
		TAHAP XXVI		-	-	14.672	13.832	28.504
		SUB TOTAL		-	-	14.728	13.832	28.560

- Ijin impor tahap pertama sebanyak 20.000 ton seluruhnya telah tiba di Indonesia.
- Ijin impor tahap 2 sebanyak 40.000 ton direncanakan akan tiba sebesar 28.504 Ton, terinci bulan April 14.672 ton dan bulan Mei 13.832 ton

14-Apr-22

www.bulog.co.id | Perum Bulog | @PerumBulog | @perum.bulog | Perum Bulog

7

- Rencana dan Realisasi Penyaluran Kedelai



RENCANA & REALISASI PENYALURAN KEDELAI

Uraian	Kedelai
Sasaran	Pengrajin/ahlu/Tempo/Anggota KOPTI sasaran
Lokasi	Sesuai Data KEMENKOP dan UKM (Di Seluruh Indonesia)
Periode	April- Juli 2022
Kuantum	200.000 Ton x 4 Alokasi
Harga Jual	Harga di Importir- Rp. 1.000,-
Sumber Dana	CSHP
Administrasi:	
Keputusan Rakortas	Sudah
Penugasan Mendag	Sudah
Penugasan BUMN	Sudah
Data Sasaran	Sudah

No	PUSKOPTI	Pagu April Kg	Kebutuhan Kg	Harga Jual R/kg	Lelang Batch 1 (s.d 29 April 2022)			%
					Realisasi Penyaluran Kg	16-Apr-22	Total	
1	Aceh	25.000	10.000	10.525	-	-	-	0,0%
2	Bengkulu	900.000	120.000	10.350	-	-	-	0,0%
3	Lampung	4.567.110	1.000.000	10.350	50.000	-	50.000	5,0%
4	Banten	300.060	100.000	10.050	-	-	-	0,0%
5	DKI Jakarta	8.915.857	4.500.000	10.050	-	-	-	0,0%
6	Jawa Barat	19.737.853	10.000.000	10.250	360.000	-	360.000	3,6%
7	Jawa Tengah	6.169.983	3.000.000	10.200	-	-	-	0,0%
8	DIY	1.266.255	750.000	10.300	-	-	-	0,0%
9	Jawa Timur	4.884.602	2.300.000	10.050	-	-	-	0,0%
10	Kaltim	478.650	478.650	10.050	-	-	-	0,0%
11	Sulsel	1.360.500	215.000	10.575	-	-	-	0,0%
12	Bali	689.750	300.000	10.350	-	-	-	0,0%
13	NTB	1.540.890	400.000	10.500	-	3.000	3.000	0,8%
		50.536.510	23.173.650		410.000	3.000	413.000	1,8%



RENCANA & REALISASI PENYALURAN KEDELAI

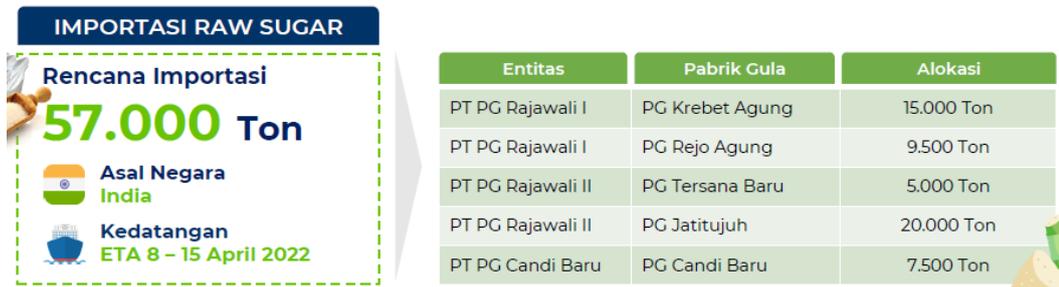
Uraian	Jagung
Sasaran	Peternak Mandiri
Lokasi	8 (Delapan) Provinsi: Jatim, Jateng, Jabar, DIY, Lampung, Sumbang, Sumut, Banten
Periode	April- Juni 2022
Kuantum	50.000 Ton
Harga Jual	Rp. 4.500,- / Kg
Sumber Dana	CSHP
Administrasi:	
Keputusan Rakortas	Sudah
Penugasan Mendag	Sudah
Penugasan BUMN	Sudah
Data Sasaran	Belum

• Untuk penyaluran jagung Perum BULOG masih menunggu data peternak sasaran dari Kementerian Pertanian

- Kontribusi ID Food setelah peraturan DMO/DPO dicabut

- ID Food menjadi distributor minyak goreng curah
- Sumber minyak goreng berasal dari principal yang tidak mempunyai jalur distribusi domestik
- ID Food berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan tetap mendistribusikan minyak goreng curah

- Optimalisasi Kebijakan dan Penugasan Pemerintah ke ID FOOD



- Sinergi Ekspor ID FOOD



- Diskusi dan tanya jawab terkait ketersediaan pangan menjelang Idul Fitri dan isu-isu strategis pangan lainnya di Kantor Bulog Wilayah Sulawesi Tenggara, antara lain:

A. Pertanyaan Anggota Dewan

1. Bagaimana ketersediaan, stok, distribusi, harga dan jangkauan masyarakat terhadap 9 (sembilan) bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri di tingkat nasional terlebih khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara:

- Minyak Goreng;
- Cabe;
- Daging Sapi dan Kerbau;
- Kedelai.

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penyediaan kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok bagi masyarakat di tingkat nasional terlebih khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara menjelang Hari Raya Idul Fitri dan bagaimana strategi penyelesaian masalah tersebut terkait:

- Distribusi;
- Subsidi;
- Gudang, truk tangki, jerigen, *cold storage* dan *cold storage portable*;
- Titik serah minyak goreng;
- Persaingan harga bahan pokok import vs lokal;
- Importase yang terus meningkat;
- Penyediaan lahan, bibit, pengendalian hama khusus untuk kedelai dan jagung;
- KUR bagi petani kedelai;

3. Isu-isu krusial apa saja yang perlu dipecahkan terutama terkait komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Tenggara;

B. Tanggapan Pemerintah dan BUMN

1. Kementerian Pertanian (Ditjen Tanaman Pangan)

- 90% (sembilan puluh persen) kebutuhan kedelai nasional diperoleh dari import, 10% (sepuluh persen) dari program atau kedelai lokal. Periode Januari hingga Maret tahun 2022 secara nasional import kedelai yang masuk sebesar 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) ton, sedangkan bulan April sebesar 400.000 (empat ratus ribu) ton, sementara kebutuhan nasional per bulan adalah 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu) ton, sehingga ketersediaan secara nasional aman. Sementara dari program kedelai lokal sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu) ton sampai dengan 40.000 (empat puluh ribu) ton;
- Realisasi import kedelai di tahun 2021 sebesar 2,48jt (dua koma empat puluh delapan juta) ton untuk kebutuhan tempe dan tahu, dengan rincian, kurang lebih 2jt (dua juta) ton untuk tempe dan 1jt

(satu juta) untuk tahu, sehingga total secara nasional untuk kebutuhan tempe dan tahu adalah sebesar kurang lebih sebesar 3.000.000 (tiga juta) ton;

- Program penanaman tanaman kedelai di tahun 2021 direncanakan akan ditanam pada lahan seluas 400.000 (empat ratus ribu) Ha. *refocusing* 300.000 (tiga ratus ribu) Ha., 200.000 (dua ratus ribu) Ha., dan terakhir di angka 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) Ha., berdasarkan perhitungan Kementerian Pertanian untuk mendapatkan 1.000.000 (satu juta) ton kedelai dibutuhkan lahan seluas 600.000 (enam ratus ribu) Ha;
- Kementerian Pertanian berusaha mengejar target penanaman tanaman kedelai di 600.000 (enam ratus ribu) Ha di seluruh wilayah Indonesia, terlebih khusus untuk di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang di dukung oleh KUR untuk meningkatkan minat petani, strategi lain yang dilakukan di penanaman yaitu: pertama untuk daerah pengenalan baru diantara tanaman jagung diselipin tanaman-tanaman kedelai dengan rincian 15 Kg jagung diselipin 50 Kg kedelai, kedua meningkatkan kualitas benih untuk produktivitas 1,5 (satu koma lima) ton per hektar, pengendalian hama penyakit tanaman kedelai, ketiga meningkatkan harga pembelian di tingkat petani dari Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah);
- Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2022 untuk penanaman tanaman kedelai seluas 52.000 (lima puluh dua ribu) Ha menurun dari tahun sebelumnya, dan telah ditanam 12.000 (dua belas ribu) Ha, sebagian besar ditanam di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
- Menurut data Kementerian Pertanian melalui Ditjen Tanaman Pangan, luas lahan untuk sentra tanaman kedelai di Provinsi Sulawesi Tenggara kurang lebih 500 (lima ratus) Ha. Untuk mendukung program peningkatan produksi kedelai lokal,

Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan target 15.000 (lima belas ribu) Ha untuk tanaman jagung yang dapat diselipkan tanaman kedelai;

- Kementerian Pertanian melalui Ditjen Tanaman Pangan mendata harga rata-rata 12 (dua belas) komoditas pangan strategis di Provinsi Sulawesi Tenggara, adapun ke 12 (dua belas) komoditas pangan tersebut adalah beras, cabe besar, cabe kecil, cabe rawit, jagung, kedelai, bawang merah dan putih, telur dan daging ayam, daging sapi serta minyak goreng. Dari ke 12 (dua belas) komoditas pangan strategis tersebut, minyak goreng yang harganya tinggi dan pasokannya terbatas, cabe harganya sudah menanjak naik serta stoknya sudah mulai menipis. Solusi untuk pasokan komoditas cabe akan diperoleh dari Prov. Sulawesi Selatan yang surplus;

2. Kementerian Perikanan dan Kelautan (Ditjen Perikanan Tangkap)

- Pantauan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait ketersediaan ikan di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum aman bahkan *surplus*, produksi ikan sekitar 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) ton, sedangkan kebutuhan konsumsi Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sampai 200.000 (dua ratus ribu ton), sebagian hasil produksi diekspor, harga ikan di Provinsi Sulawesi Tenggara relatif stabil.

3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Dinas Pertanian)

- Harga-harga 9 (sembilan) bahan pokok sejauh ini masih terkontrol dan dalam batas normal demikian halnya dengan keterdiannya, namun yang menjadi kekhawatiran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu terkait stok dan harga cabe, stok saat ini yang mulai menipis diperkirakan hanya bisa bertahan untuk 1 (satu) bulan ke depan, demikian halnya dengan harga cabe yang sudah mulai menanjak naik.

- Minyak goreng curah untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan kuota 2.624 Ton, kuota tersebut dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng Provinsi Sulawesi Tenggara selama 7 (tujuh) bulan ke depan, namun demikian dari sejumlah kuota minyak goreng tersebut hingga saat ini keberadaannya belum sampai di Provinsi Sulawesi Tenggara dikarenakan kendala biaya transportasi yang cukup tinggi dari produsen di Sulawesi Barat ke titik serah di Sulawesi Tenggara, biaya perkilo sebesar Rp. 2.000,- atau setara dengan 5 Milyar rupiah untuk kuota tersebut.
- Program distribusi dan transportasi dengan menggunakan sistem tangki dan truk tangki (distribusi dan transportasi bersubsidi) untuk saat ini masih terbatas di wilayah barat Indonesia, sedangkan di wilayah timur Indonesia menggunakan sistem “jiregen” (bersubsidi), sehingga biaya transportasi dari produsen minyak goreng ke titik serah belum mendapatkan subsidi dari pemerintah.
- Penentuan titik serah minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara perlu kiranya mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas mengingat Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kepulauan, hanya 9 kabupaten/kota dari total 17 kabupaten/kota yang dapat dijangkau dengan transportasi darat (daratan) sedangkan yang lain dengan transportasi laut (kepulauan). Dengan demikian harga minyak goreng curah diharapkan bisa lebih murah dan merata.
- Harga minyak goreng curah di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di kota Kendari mencapai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per liter sedangkan minyak goreng premium mencapai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bahkan minyak goreng premium di swalayan bisa mencapai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga serta gejolak minyak goreng, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara gencar mensosialisasikan minyak goreng alternatif yaitu menggunakan kelapa dalam dan membantu masyarakat dalam

produksi minyak goreng kepada masyarakat, potensi kelapa dalam di Provinsi Sulawesi Tenggara cukup besar.

- Harga daging sapi cukup tinggi di Prov. Sultra mencapai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per kilo gram, sedangkan daging kerbau Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Untuk memenuhi ketersediaan dan pasokan kedelai lokal pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyiapkan lahan sebesar 4.472 (empat ribu empat ratus tujuh puluh dua) Ha di tahun 2021, sedangkan di tahun 2022 sebesar 3.000-an (tiga ribuan) Ha, sehingga total mencapai 7.000 (tujuh ribuan) Ha, yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten yang menjadi sentra penanaman kedelai, sisanya tanaman kedelai ditanam diantara tanaman jagung. Data produksi kedelai belum dapat ditampilkan karena baru ditanam di awal tahun 2022.
- Minat petani di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menanam tanaman kedelai masih rendah, hal ini terjadi karena tanaman kedelai belum terlalu menguntungkan jika dibandingkan tanaman lainnya seperti jagung, meskipun demikian pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui dinas pertanian terus mensosialisasikan dan membantu petani, misalnya melalui KUR dengan jalan mempertemukan antara petani dengan pihak bank serta pihak asuransi penjamin. Untuk meningkatkan minat petani dalam menanam tanaman kedelai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pertanian, meminta agar subsidi terhadap kegiatan pengembangan kedelai tidak dicabut, serta mempermudah persyaratan KUR bagi petani kedelai;
- Total lahan yang tersedia untuk padi dengan potensi lahan produktif di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak kurang lebih 2.858.277 (dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) Ha, terdiri dari 124.010 (seratus dua puluh empat ribu sepuluh) Ha lahan fungsional, 97.100 (Sembilan puluh

tujuh ribu seratus) Ha lahan usaha fungsional dan kurang lebih 26.000 (dua puluh enam ribu) Ha lahan irigasi, sisanya adalah 2.000.000 (dua juta);

- Perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait luasan lahan garapan di Provinsi Sulawesi Tenggara, menyebabkan penurunan produktivitas tanaman padi, sebagai contoh produktivitas padi tahun 2021 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020, karena data lahan garapan petani tidak masuk dalam data BPS, di sisi lain penyesuaian dan pemutakhiran data dilakukan 4 tahun sekali.

4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Dinas Perikanan dan Kelautan)

- Ketersediaan ikan di Provinsi Sulawesi Tenggara cukup melimpah dan harganya relatif stabil;
- Beberapa program unggulan yang didukung oleh potensi sumber daya alam yang melimpah bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pengembangan udang melalui tambak, pengembangan budidaya rumput laut, pengembangan budidaya lobster;
- Kendala yang dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian untuk pengembangan dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu :
 - Saat ini kebijakan pupuk bersubsidi berada di Kementerian Pertanian, di sisi lain periode waktu penggunaan pupuk antara bidang pertanian (petani) dan bidang perikanan (petambak) berbeda, hal tersebut menyebabkan petambak sulit untuk mengakses dan mendapatkan pupuk bersubsidi baik dari segi harga maupun ketersediaan (pasokan dan stok). Untuk itu diperlukan kebijakan kemudahan untuk dapat mengakses

pupuk bersubsidi bagi para petambak/nelayan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Potensi rumput laut di Provinsi Sulawesi Tenggara cukup besar baik dari segi kualitas dan kuantitas, dalam waktu yang sama budidaya rumput laut mampu meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut. Salah satu contohnya adalah rumput laut yang berada di Kabupaten Wakatobi, Pulau Tomia, merupakan salah satu rumput laut terbaik di Indonesia bahkan di dunia, namun yang menjadi kendala yang dihadapi terkait pengembangan budidaya rumput laut di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu belum adanya kebun benih rumput laut.
- Kementerian Kemaritiman bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Kolaka menjadikan wilayah Mangolo sebagai wilayah tangkap, untuk mendukung peningkatan produktivitas wilayah Mangolo sebagai kawasan tangkap diperlukan sarana prasana berupa dermaga.

5. Balai Karantina Pertanian Sulawesi Tenggara

- Mengawasi dengan ketat terhadap hama dan penyakit (tanaman dan hewan) yang masuk dan keluar Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Melaksanakan tugas dari Kementerian Pertanian untuk melakukan pemantauan harga 12 (dua belas) komoditas pangan strategis di 17 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk diantaranya memantau dan terus meng-update ketersediaan dan harga minyak goreng.

6. Perum Bulog

- Ketersediaan stok beras CBP di Provinsi Sulawesi Tenggara masih mencukupi untuk 4 (empat) bulan mendatang;
- Perum Bulog diberi penugasan untuk mendistribusikan kedelai selama 4 (empat) bulan sejak April hingga Juli 2022, setiap

bulannya dialokasikan 200.000 (dua ratus ribu) ton untuk didistribusikan ke anggota Gapokindo seluruh Indonesia, pendistribusian kedelai pihak Perum Bulog menunggu masukan data dan informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, bulan April 2022 baru dapat 50.000 (lima puluh ribu) ton dari pagu, pengrajin tempe 23.000 (dua puluh tiga ribu) ton, dengan penetapan harga diimportir dikurangi Rp.1.000,- (seribu rupiah) per kilogram (Kg), ditanggung subsidi oleh pemerintah. Harga kedelai per kilogramnya Rp. 11.050,- (sebelas ribu lima puluh rupiah) sampai dengan 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) tergantung posisinya.

7. Tanggapan ID FOOD

- Distribusi 30 juta ton minyak goreng ke seluruh wilayah di Indonesia dilakukan oleh 2 (dua) anak perusahaan ID Food yang terdiri dari 82 cabang;
- Berdasarkan peraturan menteri yang terbaru metode pendistribusian minyak goreng curah agak sedikit berbeda dengan peraturan sebelumnya, jika pada peraturan sebelumnya mangacu pada *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) dari Kementerian Perdagangan sekarang masuk ke Kementerian Perindustrian, isunya bagaimana produsen itu bisa *match* dengan secara bisnis dengan distributor seperti ID Food, ada beberapa hal yang disepakati di bisnis *match* dengan produsen minyak goreng misalnya terkait tangki untuk penimbunan sementara minyak goreng di pelabuhan untuk selanjutnya didistribusikan ke konsumen melalui truk tangki atau misalnya untuk di daerah bagian timur pendistribusian melalui jerigen, atau dikoneksikan dengan tol laut.
- ID Food melakukan *business match* dengan pihak produsen minyak goreng terkait subsidi distribusi yang akan dibayarkan ke pihak distributor;

- Minyak goreng curah di Provinsi Sulawesi Tenggara diperoleh dari produsen minyak goreng di Sulawesi Barat, waktu tempuh dari produsen ke titik serah Sulawesi Tenggara membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) hari, harga minyak goreng di ID Food Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);
- Import daging sapi dari Negara Brazil saat ini sedang dalam proses (*on progress*).

IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkaji ulang dan mensosialisasikan secara masif Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengingat masih adanya gejolak di masyarakat utamanya masyarakat Sulawesi Tenggara;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk menambah kuota BBM bagi nelayan, mengingat masih adanya kelangkaan BBM di beberapa daerah seperti di PPS Samudra Kendari, Sulawesi Tenggara;
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tidak menutup sepenuhnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia 714 karena terdapat nelayan lokal yang hidupnya bergantung pada WPP 714 sebagai tempat untuk mencari;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan dukungan sarana prasarana seperti bantuan *cold storage* dan pupuk bersubsidi kepada pembudidaya rumput laut agar potensi rumput laut yang besar di Sulawesi Tenggara dapat dioptimalkan;
5. Komisi IV DPR RI meminta PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara untuk melarang dan mengawasi ketat secara berkelanjutan terhadap Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan KSO MTT yang melakukan

- penambangan di dalam kawasan hutan IUP milik PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara;
6. Komisi IV DPR RI meminta PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara untuk memberikan pembinaan dan mengawasi ketat secara berkelanjutan terhadap KSO MMT yang melakukan penambangan di dalam IUP milik PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara terkait pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 7. Komisi IV DPR RI meminta PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara untuk segera mengajukan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas IUP yang dimiliki selanjutnya melaksanakan kewajiban IPPKH;
 8. Komisi IV DPR RI meminta PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara untuk segera mengajukan permohonan revisi dan penyesuaian dokumen AMDAL untuk menyesuaikan kondisi dan keadaan lingkungan saat ini pada IUP yang dimiliki;
 9. Komisi IV DPR RI meminta PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara untuk segera melakukan audit lingkungan menggunakan auditor lingkungan yang independen pada IUP PT Antam Tbk.;
 10. Komisi IV DPR RI mendorong PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara untuk melakukan perbaikan tata kelola konsesi IUP PT Antam Tbk. dalam rangka pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melaksanakan RDPU dengan pihak PT Antam Tbk. dalam rangka menindaklanjuti hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Tenggara.
 11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencegah, mengawasi, dan menyelidiki serta menindak PT Antam Tbk., maupun KSO MMT apabila kegiatan penambangan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan, tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban lingkungan, serta apabila melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen IPPKH;

12. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengawasi, memaksa hingga menindak PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara dan 11 Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang telah dicabut IUP nya namun belum melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemulihan lingkungan, reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang serta kewajiban IPPKHnya;
13. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendata dan memetakan kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat penambangan di dalam dan di sekitar area terdampak IUP PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara;
14. Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk mencari solusi adanya biaya transportasi dari podusen minyak goreng di Sulawesi Barat ke Titik Serah di Sulawesi Tenggara yang mengakibatkan harga minyak goreng melambung tinggi;
15. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Cq. Kementerian Pertanian dan Perum Bulog untuk memastikan volume importasi kedelai sesuai kebutuhan agar tidak mengganggu harga produksi lokal dan didistribusikan secara tepat.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Sulawesi Tenggara. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, April 2022
Ketua Tim,

Ttd.

Anggia Erma Rini, M.K.M
A-41

LAMPIRAN

1. Liputan Kegiatan di Media

- ✓ <https://sultra.tribunnews.com/2022/04/19/komisi-iv-dpr-ri-pastikan-ketersediaan-pangan-strategis-di-sulawesi-tenggara-aman-jelang-lebaran>
- ✓ <https://wartaekonomi.co.id/read408709/komisi-iv-dpr-soroti-harga-minyak-goreng-curah-yang-tinggi-di-sulawesi-tenggara>
- ✓ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38668/t/Harga+Minyak+Goreng+Curah+di+Sultra+Masih+Tinggi>
- ✓ <https://m.jpnn.com/news/jelang-lebaran-anggota-komisi-iv-dpr-pastikan-ketersediaan-pangan-di-sultra-aman>
- ✓ <https://pedomanrakyat.com/komisi-iv-dpr-tinjau-lokasi-pencemaran-penambangan-di-blok-mandiodo-konawe-utara/>
- ✓ <https://rakyatpostonline.com/2022/04/21/kunker-dpr-ri-di-blok-mandiodo-tak-berdampak-kepada-perambahan-hutan/>

2. Dokumentasi

